

# PROSIDING

ISBN :



## KONVENSI NASIONAL



UNIVERSITAS  
BUDI LUHUR

ASOSIASI  
ILMU  
HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
INDONESIA

### Tema KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAHAN JOKOWI: AGENDA DAN PRIORITAS

#### Topik Pembahasan



EKONOMI POLITIK  
INTERNASIONAL



DIPLOMASI



SDA/ ENERGI



GENDER



KAWASAN



KEAMANAN



MARITIM



STUDI HI  
INDONESIA



MEDIA DAN TATA  
KELOLA GLOBAL

25-28 November 2014  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi

i  
iii

### KELOMPOK I

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Memposisikan Indonesia sebagai Katalisator dalam Memaknai *ASEAN Identity* pada Pilar *ASEAN Socio-Cultural Community* Dimasa Pemerintahan Joko Widodo oleh Yusran dan Afri Asnelly

UNIVERSITAS INDONESIA

Negara dan Prt Pekerja Migran: Telaah Gender, Ekonomi Politik Internasional, dan Migrasi Internasional oleh Ani Soetjipto

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Dialog Antar Agama Dalam Diplomasi Publik sebagai *Soft Power* Indonesia : Sebuah Kajian Awal oleh Novita Rakhmawati

I

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Membangun Poros Maritim Indonesia Relevansi Aspek Sosial Budaya oleh V.L. Sinta Herindrasti

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

*Strategic Trade Policy* Ekspor Kedelai Amerika Serikat, Malaysia, Dan Cina Ke Indonesia (2007-2013) oleh Andre Ardidan Ayu Astuti

### KELOMPOK II

UNIVERSITAS ANDALAS

Prespektif *Local Leader* Terhadap Kesiapan Sumatra Barat dalam Menghadapi ASEAN COMMUNITY 2015. Studi Kasus : Pada Kota Bukit Tinggi, Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya oleh Poppy Irawan, S.IP, MA.IR

II

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kembali ke Masa Depan? Membaca Arah Politik Luar Negeri Jokowi dan Prospek Indonesia Menjadi Pemain Global oleh Mohamad Rosyidin

iii

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Analisis Kekuatan Maritim Sebagai Komponen Utama *Hard Power* Indonesia Di Era Presiden Joko Widodo oleh Sukmawani Bela Pertiwi, MA

UNIVERSITAS INDONESIA

Diplomasi Antar kawasan: Menggunakan ASEAN dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Uni Eropa di Sektor Kelapa Sawit oleh Shofwan Al Banna Choiruzzad

UNIVERSITAS PARAMADINA

Menyasar Kekuatan Indonesia Sebagai Suatu Kekuatan Mandiri di Kawasan oleh DR. Tatok Djoko Sudiarto, M.I.B & Emil Radhiansyah, M.Si

### KELOMPOK III

PRESIDENT UNIVERSITY

*Impact of Joko "Jokowi" Widodo Leaderships on Indonesia's World Maritime Axis* oleh Hendra Manurung, MA

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Era Jokowi : Sebuah Kemungkinan oleh Anna Yulia Hartati

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dari Teritorialisasi Maritim ke Maritimisasi Teritorial Evolusi Strategi Maritim Indonesia oleh Joko Susanto

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Memperkuat Posisi RI di Kancah Internasional Melalui Diplomasi *Soft Power* oleh Sartika Soesilowati PhD

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Peluang dan Tantangan Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo: Dari Perbatasan Hingga Masalah Persiapan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA ) oleh Siti Mutiah Setiawati

UNIVERSITAS INDONESIA

Meletakkan Peran Kota dalam Strategi Diplomasi Pro-Rakyat Pemerintahan Jokowi-JK oleh Nurul Isnaeni

## MEMBANGUN POROS MARITIM INDONESIA RELEVANSI ASPEK SOSIAL BUDAYA<sup>1</sup>

V.L. Sinta Herindrasti  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur 13630  
[Herindrasti@yahoo.com](mailto:Herindrasti@yahoo.com)

### Abstrak

*Pemilihan umum Indonesia 2014 ditandai dengan munculnya sosok presiden yang fenomenal -- Joko Widodo -- dari bukan siapa-siapa, seorang rakyat biasa yang menapak usaha mebel dari bawah, kemudian menjadi walikota Solo yang sukses, melompat menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian berhasil menjadi Presiden RI ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudoyono yang bertahan dalam 2 periode -- setelah mengalami perjuangan yang “tidak biasa”. Visi dan misinya pun dianggap “lain daripada yang lain” yaitu ingin melakukan revolusi mental bagi masyarakat Indonesia yang mengalami “kemandekan” sosial, ekonomi dan politik di sana-sini; korupsi yang merajalela, penggelapan pajak, mafia peradilan, mafia minyak, pengkhianatan demokrasi oleh wakil rakyat dan sebagainya. Salah satu kebijakan Joko Widodo-Yusuf Kalla untuk mengembalikan kejayaan Indonesia adalah pembangunan menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional sehingga akhirnya dapat menjadi poros maritim dunia (global maritime axis). Namun dalam tataran realitas di lapangan, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan agar pembangunan maritim dapat tercapai. Ada berbagai potensi masalah ketika pembangunan maritim hendak dijalankan, mengingat Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau berukuran mikro, sedang dan besar dengan masyarakat pesisirnya yang sangat beragam. Pembangunan maritim juga melibatkan berbagai sektor dan rejim kepemilikan; yang bila dicermati sektor masyarakat merupakan unsur yang paling rentan dari kedua unsur lain yaitu pemerintah dan swasta. Tulisan ini berargumen bahwa untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan maritim besar dibutuhkan keseimbangan keterlibatan dan peran berbagai sektor – terutama sektor masyarakat pesisir yang mayoritas subsisten – melalui pemetaan geososial, budaya dan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kelautan. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui masalah dan potensi sumber daya masyarakat kelautan di seluruh daerah pesisir Indonesia dan penempatan teknologi secara tepat – mengingat pembangunan maritim modern akan melibatkan unsur manajemen sumber daya modern beserta inovasi teknologinya. Pemetaan sosial budaya beragam masyarakat pesisir Indonesia akan menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga masyarakat pesisir dapat mengikuti perubahan yang terjadi dan tidak justru terdesak, tergusur dan semakin terasing di tengah masyarakat industri. Tawaran pemetaan geososial, budaya dan ekonomi akan melengkapi orientasi pembangunan maritim yang bersifat fisik sebagaimana dipahami saat ini. Tawaran pemetaan geososial budaya ekonomi juga diharapkan menjadi faktor keberhasilan politik luar negeri andalan pemerintahan Jokowi yaitu sebagai negara kepulauan dan maritim yang kuat dan menjadi poros maritim dunia.*

**Kata Kunci:** *pembangunan maritim, poros maritim, rejim kepemilikan, pemetaan geososial-budaya-ekonomi, manajemen sumber daya modern*

---

<sup>1</sup> Paper dipresentasikan dalam Konvensi Nasional V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Jakarta 24-28 November 2014.

## **Pendahuluan**

Indonesia paska pemilihan presiden 2014 menapak era baru, yaitu penancangan pembangunan kelautan (maritim) sebagai bagian utama dalam pembangunan nasional. Sesuatu yang dianggap memang sudah seharusnya mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dimana masa depan Indonesia ada di laut. Hal ini berarti akan terdapatnya *mainstreaming* kelautan dalam berbagai kebijakan pemerintah baik dalam bidang keamanan, pangan, energi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, geopolitik, manajemen pembangunan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Mengingat luasnya cakupan aspek yang harus direncanakan dan dikerjakan dalam kaitannya dengan kemaritiman dan mengemukanya dominasi berbagai kepentingan sektoral, maka menjadi menarik bagaimana pemerintah Jokowi-JK memberikan prioritas dan menentukan strategi untuk percepatan pembangunan maritim. Apakah aspek sosial budaya juga akan menjadi perhatian selain aspek pembangunan infrastruktur, penarikan investasi dalam modernisasi maritim? Mengapa aspek sosial budaya sangat penting? Mungkinkah membangun “poros maritim dunia” tanpa melibatkan mayoritas masyarakat pesisir di berbagai kepulauan di Indonesia?

Paper ini akan lebih melihat relevansi faktor sosial budaya dalam pembangunan maritim di Indonesia, mengaitkannya dengan konsep rejim kepemilikan sumber daya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para ahli ilmu sosial untuk menyeimbangkan tiga sektor penyangga poros maritim, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **Memahami Visi Misi dan Program Jokowi – Jusuf Kalla 2014**

Judul buku putih program pasangan calon presiden dan wakil presiden no 2 adalah “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014” diterbitkan pada Mei 2014 setebal 41 halaman. Dibuka dengan statement pendahuluan yang menegaskan bahwa “...16 tahun setelah reformasi 1998 yang menjanjikan Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat, jalan menuju pemenuhan semakin terjal dan penuh ketidakpastian...Indonesia terbelenggu dalam transisi yang berkepanjangan...”.<sup>3</sup> Dan dilanjutkan dengan uraian tiga problem pokok bangsa, yaitu (1) ancaman terhadap wibawa negara, (2) kelemahan sendi perekonomian bangsa dan (3)

---

<sup>2</sup> Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press, 2009. Hal 103-104.

<sup>3</sup>Lihat dalam *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014*. Jakarta, Mei 2014. Hal 1.

intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.<sup>4</sup> Untuk bertahan dari deraan gelombang sejarah pasangan Jokowi-Kalla ingin meneguhkan kembali jalan ideologis bangsa sebagai penuntun, penggerak, pemersatu dan pengarah yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Jika Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar sekaligus arah dalam membangun jiwa bangsa; maka Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi *terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong* akan ditempuh melalui 7 butir misi, yaitu (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; **(6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;** (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>5</sup>

Adapun agenda yang ditawarkan adalah 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dari 31 agenda strategis itu diperas lagi dalam 9 agenda prioritas (Nawa Cita), yaitu (1) menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (2) akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

---

<sup>4</sup> Lih ibid., hal 1-2 Mengenai ancaman terhadap wibawa negara diuraikan "...wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakkan hukum dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak mempunyai kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan kearah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan, yang lebih memberl keuntungan bagi perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi kepentingan nasional.."

<sup>5</sup> Ibid., hal 6.

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) mempertahankan ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.<sup>6</sup>

### **Pembangunan Maritim bagi Kepulauan Indonesia**

Isu pembangunan maritim dalam program pemerintahan Jokowi –JK bagian dari Misi ke 6, yaitu *mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional* dan merupakan bagian dari 16 agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari secara ekonomi. Secara khusus komitmen 10 menyatakan:

Kami berkomitmen pembangunan ekonomi maritim, melalui (1) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank pertanian), sarana produksi, infrastuktur, teknologi dan pasar; (2) Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu; (3) Pemberantasan *illegal, unregulated dan unreported fishing* (IUU); (4) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan *overfishing*, dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan *underfishing* sesuai batas kelestarian; (5) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan kelautan; (6) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan menjadi 17 juta hektar dan penambahan konservasi seluas 700 hektar; (7) Penerapan *best aqua-culture practices* untuk komoditas-komoditas unggulan; (8) Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan; (9) Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada tahun 2019.<sup>7</sup>

Dalam kaitan dengan eksistensi negara dan politik luar negeri kata kunci “maritim” juga disebut dalam misi ke-3 yaitu “...*mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati*

---

<sup>6</sup> Ibid., hal 6-11

<sup>7</sup> Ibid., hal 35-36

*diri sebagai negara maritim..*”. “Maritim” dalam kaitan dengan kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa dan rasa aman seluruh warga negara juga muncul dikaitkan dengan *keamanan maritim Indonesia, batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam*.<sup>8</sup>

Secara khusus dalam hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia juga menekankan prioritas sebagai negara kepulauan: “...kami akan berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Politik luar negeri akan diwujudkan dalam 5 agenda aksi: diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia; menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan...meredam rivalitas maritim diantara negara-negara besar ...”.

Lingkungan strategis keterlibatan regional juga digarispawahi berupa “... memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik – mengintegrasikan dua samudra – Hindia dan Pasifik...” termasuk mendorong kerjasama maritim komprehensif melalui the Indian Ocean Rim Association (IORA).

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pembangunan maritim dalam visi-misi Jokowi-JK mencakup “jati diri” (identitas), “kedaulatan”, “keamanan”, “ekonomi maritim”, dan “diplomasi maritim” yang mencakup lingkungan strategis Indo-Pasifik. Lebih jauh dalam konteks regional dan global, wacana mengenai Indonesia menjadi “poros maritim dunia” (*global maritime axis*) juga muncul.

## **Makna Maritim**

Makna maritim dengan demikian menjadi penting didalami untuk melihatnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Alex Retraubun<sup>9</sup> melihat cakupan julukan kelautan, kepulauan dan kemaritiman yang selalu melekat pada bangsa Indonesia. Sifat kepulauan memang sudah menjadi kodrat, dimana struktur geografi Indonesia memang terdiri dari ribuan pulau berukuran mikro, kecil sampai besar (kontinen). Indonesia selalu dikatakan negara kepulauan terbesar (*the*

---

<sup>8</sup> Ibid., hal 7

<sup>9</sup> Tempo 11 Agustus 2014. Wakil Menteri Perindustrian dan Profesor di bidang manajemen sumberdaya perikanan Universitas Pattimura, Ambon.

*world's archipelagic state*).<sup>10</sup> Terdiri dari 18.108 pulau memanjang mulai dari pulau bagian barat yang bergunung di Bruéh hingga P. Sibir di Teluk Yos Sudarso di belahan timur Indonesia. Letaknya antara 97° dan 141° bujur timur dan 6° bujur utara dan 11° bujur selatan, Indonesia mempunyai areal kelautan seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 0,3 km<sup>2</sup> teritorial laut, 2,8 juta km<sup>2</sup> laut kepulauan dan 2,7 km<sup>2</sup> Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>11</sup> Jika jumlah pulau berbanding lurus dengan jumlah pantai maka akan berdampak pada panjangnya garis pantai mencapai setidaknya 80.791 km.

Sifat kepulauan diperkuat pemerintah Indonesia melalui UU RI No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Bab I Pasal 2 ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan serta ayat (2) segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Dari segi letak juga dianggap mempunyai posisi sangat strategis karena berada di antara dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan dua samudra besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia – suatu jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang penting yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Afrika dengan berbagai kekuatan ekonomi Asia. Perlu ditambahkan juga bahwa Indonesia mempunyai tiga selat penting yaitu Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda dan Selat Lombok – bukan merupakan selat internasional akan tetapi merupakan jalur navigasi internasional untuk mendukung transportasi komoditas bernilai tinggi seperti minyak, gas dan barang industrial; termasuk rute strategis transportasi militer.<sup>13</sup>

Adanya ratifikasi UNCLOS 1982 (the United Nations Convention on the Law of the Sea) oleh negara-negara di dunia, semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagaimana kita ketahui dalam UNCLOS 1982 konsep negara kepulauan (*archipelagic state*)

---

<sup>10</sup> Robert Cribb dan Michele Ford, "Indonesia as Archipelago: Managing Islands, Managing the Seas" dalam Robert Cribb dan Michele Ford (Ed), *Indonesia Beyond the Water's Edge Managing an Archipelagic State*, Singapore: ISEAS, 2009. Hal 1. Meskipun disebut negara kepulauan terbesar namun dari jumlah pulau masih lebih besar Kepulauan Arctic Kanada (36.463 pulau) meliputi areal seluas 1.4 juta km<sup>2</sup>.

<sup>11</sup> Lihat Arif Havas Oegroseno, "Indonesia's Maritime Boundaries" dalam Robert Cribb dan Michele Ford (Ed), *Indonesia beyond the Water's Edge Managing an Archipelagic State*, Singapore: ISEAS, 2009. Hal 49.

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c2df98e3ec7a/node/19963>. Diunggah 15 November 2014. Pk 18.47

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 49

sebagai prinsip fundamental hukum internasional mendapatkan pengakuan secara internasional dengan disahkan dan diberlakukannya UNCLOS 1982. Bagi Indonesia UNCLOS 1982 merupakan pengakuan formal bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap perairan antar pulau-pulainya – suatu pengukuhan sebagai bangsa kepulauan yang dipersatukan oleh laut (bukan sekedar sekumpulan enklaf pulau yang dipisahkan oleh jalur laut (*sea lane*) internasional.<sup>14</sup> Pemerintah Indonesia mempertegas dengan UU No 6 Tahun 1996 Bab II pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Demikian pula mengenai pengakuan hak lintas alur laut kepulauan telah dituangkan dalam UU No 6 Tahun 1996, dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 mengenai Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan.

Sementara julukan negara maritim ditujukan bagi negara yang mampu mengelola laut untuk kejayaannya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanannya. Jadi nyata bahwa makna kelautan lebih sempit dari kemaritiman. Setidaknya terdapat 4 peubah dalam pengelolaan laut sebagai ukuran negara maritim yang kuat, yaitu (1) kemampuan pemanfaatan, (2) pengawasan, (3) pengamanan, (4) pengendalian lautnya.<sup>15</sup> Menurut Alex Retraubun, laut sendiri mempunyai dua fungsi penting yaitu *fungsi produksi* dan *penawar jasa*. Mengelola fungsi produksi bermuara pada sehatnya laut untuk menghasilkan sumber daya hayati dalam jumlah masif sesuai luasan fisiknya sebagai habitat sehingga dapat dinikmati nilai ekonominya. Sementara mengelola jasa berarti mengembangkan kebijakan yang menggunakan laut sebagai media konektivitas untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan memanfaatkan

---

<sup>14</sup> Lih Ibid., hal 50 dan [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm). UNCLOS mengatur al (1) territorial sea and its contiguous zone (limit of the territorial sea, innocent passage in the territorial sea, contiguous zone); (2) straits used for international navigation (transit passage, innocent passage), (3) archipelagic states; (4) exclusive economic zone; (5) continental shelf; (6) high seas (conservation and management of the living resources of the high seas); (7) regime of islands; (8) enclosed and semi-enclosed sea; (9) right of access of land-locked states to and from the sea and freedom of transit; (10) the area; (11) protection and preservation of the marine environment.

<sup>15</sup> Alex Retraubun, "Poros Maritim Dunia: Realistiskah?". Tempo 11-17 Agustus 2014, hal 19

keindahan pesisir dan laut untuk pariwisata (*marine tourism*) sekaligus mengelola kodrat geografi untuk kepentingan politik internasional.

### **Pemahaman Pembangunan Maritim**

Sejauh ini nampaknya pembangunan isu maritim baru dipahami dalam kerangka fisik (infrastruktur, “maritime highway”)<sup>16</sup> daripada faktor manusia dengan budayanya. Melihat jumlah pulau yang mencapai puluhan ribu, maka dapat dipastikan pembangunan maritim hendaknya melibatkan penduduk kawasan pesisir – yang berarti tidak cukup hanya fokus pada sektor ekonominya, yang akan memberi kontribusi bagi pengembangan poros kelautan (*maritime axis*) - akan tetapi juga faktor sosio-budaya masyarakatnya harus dipahami untuk turut mengangkat kekuatan dalam pembangunan maritim.

Seperti kita ketahui penyelenggara dan pelaku kemaritiman terdiri dari tiga sektor utama yaitu (1) pemerintah atau sektor publik, (2) dunia usaha atau sektor swasta dan (3) sektor masyarakat. Keberhasilan poros maritim sangat ditentukan oleh kesiapan dari tiga unsur tersebut. Namun jika dicermati, unsur yang paling rentan dari ketiga unsur tersebut adalah sektor masyarakat. Sehingga sebagai langkah awal penting untuk optimalisasi poros maritim adalah ***pemetaan geososial, budaya dan ekonomi*** yang terkait dengan kelautan. Pemetaan tersebut dimaksudkan sebagai penilaian (*assessment*) untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang poros maritim Indonesia. Manfaat dari pemetaan (*mapping*) geososial, budaya dan ekonomi adalah (a) mengetahui masalah dan potensi sumber daya masyarakat kelautan dan (b) penempatan teknologi yang tepat pada tingkat lokal (teknologi sederhana, menengah atau tinggi).<sup>17</sup>

Dasar budaya maritim berbasis kearifan lokal perlu digali dan dimunculkan karena pada hakekatnya budaya maritim telah berakar dalam komunitas dan praktek-praktek tradisional

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Menteri Koordinator Kelautan, Indroyono Soesilo “Discourse: Building the Foundation for Maritime Ambition”, The Jakarta Post Monday November 10, 2014, page 13

<sup>17</sup> Lihat juga I Made Andi Arsana, “Settling Maritime Boundaries, One Looming Priority” dalam The Jakarta Post, October 29, 2014, hal 6. Arsana menekankan pentingnya pendidikan untuk menunjang sumberdaya manusia agar tidak tergantung pada sumber daya kelautan yang bukannya tidak terbatas; termasuk pengembangan ilmu dan teknologi untuk ketahanan kelautan. Disamping itu Indonesia tidak perlu belajar jauh-jauh karena “nusantara” sendiri merupakan daerah budaya dan masyarakat maritim yang menonjol. Sehingga Indonesia justru perlu belajar dari sejarah masa lampau.

masyarakat nusantara.<sup>18</sup> Dalam studinya, misalnya, Adrian B. Lopian mengangkat kembali fenomena kekuatan bahari nusantara melalui tiga tipe ideal yaitu “Orang Laut”, “Bajak Laut”, “Raja Laut”.<sup>19</sup> Di Aceh kita kenal fenomena kepemimpinan bahari “Panglima Laot”, di Nusa Tenggara “Awig-awig” (peraturan bersama secara tertulis berbasis kearifan lokal untuk tujuan konservasi lokal) serta di Maluku “Petuanan Laut” – yang tanpa kita sadari telah menentukan arah perjalanan sejarah Indonesia hingga saat ini.<sup>20</sup>

### **Potensi Masalah dan Relevansi Pengetahuan Sosial Budaya**

Dalam kebijakan pembangunan maritim, laut sebagai sumber daya hayati pasti akan dikelola dan dalam proses tersebut akan menyangkut isu yang paling “*crucial*” yang dapat menimbulkan potensi masalah, yaitu (1) masalah kepemilikan dan (2) siapa yang berhak atas kepemilikan tersebut.

Setidaknya dalam kerangka pengelolaan kelautan ada tipe hak kepemilikan yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan geososial, budaya dan ekonomi<sup>21</sup> karena sifatnya yang dinamis, yaitu

- (a) hak akses (*access right*) – hak untuk masuk ke wilayah sumber daya yang memiliki batas-batas yang jelas dan untuk menikmati manfaat non-ekstraktif
- (b) hak pemanfaatan (*withdrawal right*) hak untuk memanfaatkan sumber daya atau hak untuk berproduksi
- (c) hak pengelolaan (*management rights*) untuk menentukan aturan operasional pemanfaatan sumber daya

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Adrian B. Lopian, *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu bekerjasama dengan Ecole française d’Extreme-Orient, KITLV-Jakarta, ARNI, Jurusan Sejarah FIB UGM, Jurusan Sejarah FS UNPAD, 2009.

<sup>20</sup> Op Cit. Analisis Awig-awig dalam Pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Gangga, NTB misalnya menemukan aturan awig-awig sebagai berikut 1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (jala oras, jaring klitik), pancing, bubu dan rawe dasar kecil; (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda materi maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati.  
[Http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22047](http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22047)

<sup>21</sup> Menurut Ostrom dan Schlager (1990) dalam Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press, 2009. Hal 4.

(d) hak eksklusif (*exclusion right*) hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak akses tersebut dialihkan ke pihak lain

(e) hak pengalihan (*alienation right*) hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas.

Bromly dalam A. Satria<sup>22</sup> melihat adanya empat jenis rejim kepemilikan yaitu (1) akses terbuka (*open access*), (2) negara (*state property*), (3) swasta (*private property*) dan (4) masyarakat (*communal property*).

Karakter dari empat rejim kepemilikan kiranya dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, dalam sumber daya akses terbuka tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan serta bagaimana terjadinya persaingan bebas. Dalam pemanfaatan sumber daya, model akses terbuka potensial memicu kerusakan sumber daya, konflik antar pelaku dan kesenjangan ekonomi.

Kedua, rejim negara berada di tingkat daerah hingga pusat. Hak kepemilikan berlaku pada sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Intervensi pemerintah adalah dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang bertujuan untuk alokasi, keadilan dan stabilisasi yang bersifat formal. Namun pengelolaan sumber daya milik negara membutuhkan biaya transaksi sangat tinggi terutama pada saat pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan karena sulitnya melaksanakan aturan dan menegakkan hukum. Aturan yang dibuat sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga terjadi benturan dan proses di lapangan menjadi lambat. Kendala lain yang biasanya terjadi adalah koordinasi yang lemah serta muncul konflik kewenangan baik antar pemerintah pusat, daerah maupun pihak lain.

Ketiga rejim swasta terdiri dari individu maupun korporat. Rejim kepemilikan swasta biasanya bersifat temporal (dalam jangka waktu tertentu) karena menyangkut ijin pemanfaatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemanfaatan adalah untuk tujuan komersial melalui penggunaan teknologi (tinggi). Aturan pengelolaan biasanya jelas dan kepemilikan dapat dialihkan (*transferable*). Kelemahannya adalah komitmen kepada pelestarian sumber daya alam rendah dan cenderung mengabaikan. Rejim swasta sangat berpotensi konflik dengan masyarakat setempat dan memunculkan dampak kesenjangan ekonomi.

Keempat, rejim komunal atau masyarakat bersifat lokal, turun temurun dan khas (spesifik). Aturan pengelolaan dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis dan dibuat berdasarkan pengalaman

---

<sup>22</sup> Ibid., hal 5-7

lokal sehingga pelaksanaannya lebih efektif. Sumber daya lokal milik masyarakat amat penting untuk mata pencaharian dan akses terhadap sumberdaya pun sama serta mempunyai modal produksi khas dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Ciri lain adalah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik melalui kelembagaan lokal. Kendala dalam pengelolaan sumber daya bersama adalah rendahnya pertimbangan keilmuan (*scientific*), bersifat lokal dengan proses kelembagaan yang cukup rumit.

Pengelolaan sumber daya akan menimbulkan perubahan sosial karena memasukkan unsur manajemen sumber daya modern sesuai kebutuhan beserta inovasi teknologinya. Tidak jarang teknologi yang dipakai tidak sesuai dengan sumber daya lokal karena tidak memperhitungkan budaya masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan tersebut maka mereka akan terdesak, tergusur dan terasing di tengah masyarakat industri. Tidak berlebihan kiranya jika sebagian besar masyarakat Indonesia di pesisir puluhan ribu pulau tersebut masih dalam kondisi *subsisten* dan *belum dapat mengelola sumber daya dengan baik* – dimana pekerjaan nelayan pada dasarnya penuh resiko dan hanya cukup untuk bertahan hidup.

Pengetahuan sosial budaya yang beragam berkaitan dengan masyarakat pesisir akan menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga sektor masyarakat yang dianggap paling rentan dari 2 sektor lain (pemerintah dan swasta nasional/asing) akan dapat tumbuh seimbang memperkuat poros maritim Indonesia.

## **Penutup**

*Mapping* geososial, budaya dan ekonomi diyakini akan sangat membantu pemetaan kondisi, potensi dan penyelesaian masalah berkaitan dengan pembangunan masyarakat pesisir, karena pemetaan ini mampu melihat struktur masyarakat lokal termasuk keterlibatan aktor lain pemerintah dan swasta secara keseluruhan (holistik) sehingga pendekatan pemberdayaan masyarakatnya pun akan meliputi aspek mikro maupun makro sesuai dengan hirarki masalah yang ditemukan.

Esensi “poros maritim” adalah “mengatur” dan untuk dapat mengatur dunia, Indonesia harus mampu mengatur dirinya sendiri dahulu termasuk mengatur masyarakatnya. Baru kemudian Indonesia dapat menawarkan kepada dunia hak dan kewajiban (aturan main) dalam poros maritim, yaitu dunia akan diberikan hak apa setelah sebelumnya wajib melakukan apa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsana, I Made Andi. "Settling Maritime Boundaries, one Looming Priority". The Jakarta Post, October 29, 2014.
- "Building the Foundation for Maritime Ambition". The Jakarta Post, Monday November 10, 2014 (Interview with Indroyono Soesilo, Coordinating Maritime Affairs Minister).
- Cribb, Robert and Michele Ford. 2009. *Indonesia beyond the Water's Edge Managing an Archipelago State*. Singapore: ISEAS.
- Dam, Syamsumar. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014*. Jakarta, Mei 2014.
- Kowaas, Cornelis. 2010, *Sebuah Kisah Nyata Dewa Ruci Pelayaran Pertama Menaklukan Tujuh Samudra*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lapian, Adrian B. 2009. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut*. Jakarta: Komunitas Bambu bekerjasama dengan Ecole francaise d'Extreme-Orient, KITLV-Jakarta, ARNI, Jurusan Sejarah FIB UGM, Jurusan Sejarah FS UNPAD.
- Pardede, Giffy. "Tol Laut: From Idea to Reality", The Jakarta Post Hal 7, November 20, 2014
- Retraubun, Alex. "Poros Maritim Dunia: Realistiskah?" Tempo, 11-17 Agustus 2014.
- Satria, A. 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm).
- <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22047>.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c2df98e3ec7a/node/19963>.